KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ELEKTRONIK SEBAGAI OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA: KEDUDUKAN DAN SISTEM PEMBUKTIAN

Electronic State Administrative Decisions as Objects State Administrative Lawsuits: Position and Evidence System

**Salma Destia Ratna Natalie, Ilham Dwi Rafiqi,
Zenitia Devi Surya Fernanda, Aulia Khansa Janitra**

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Jl. Arief Rahman Hakim No.150, Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur

e-mail: salma.fh23@hangtuah.ac.id , ilham.rafiqi@hangtuah.ac.id ,

zenitia.fh23@hangtuah.ac.id , aulia.fh23@hangtuah.ac.id

Naskah diterima : 08-01-2025, revisi : 10-03-2025, disetujui : 10-04-2025

Abstrak

Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik (KTUN-E) merupakan salah satu bentuk modernisasi administrasi publik yang diimplementasikan dalam sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi. Meskipun memberikan kemudahan dalam proses pembuatan dan penerbitan keputusan administrasi negara, kedudukan KTUN-E sebagai objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) masih menimbulkan permasalahan hukum. Tulisan ini mengkaji kedudukan KTUN-E dalam sistem peradilan TUN serta tantangan pembuktiannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan KTUN-E telah diakui dalam perundang-undangan di Indonesia dengan syarat memiliki keabsahan dari segi kewenangan, prosedur dan substansi. Terdapat tantangan pembuktian KTUN-E terletak pada aspek keaslian dokumen, metode penerbitan, dan keterelusuran sistem elektronik yang digunakan. Kedepan diperlukan reformasi dan penyesuaian hukum yang lebih komprehensif guna mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dalam sistem administrasi negara dan peradilan TUN.

Kata Kunci: Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik, Objek Gugatan, Pembuktian, Tata Usaha Negara

Abstract

Electronic State Administrative Decisions (KTUN-E) are one form of public administration modernization implemented in an information technology-based government system. Although it provides convenience in the process of making

and issuing state administrative decisions, the position of KTUN-E as an object of lawsuit in State Administrative (TUN) disputes still raises legal problems. This paper examines the position of KTUN-E in the TUN justice system and the challenges of proving it in practice. The research method used is normative research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the position of KTUN-E has been recognized in Indonesian legislation on the condition that it has validity in terms of authority, procedure and substance. There are challenges in proving KTUN-E in the aspects of document authenticity, issuance methods, and traceability of the electronic system used. In the future, more comprehensive legal reforms and adjustments are needed to accommodate the development of information technology in the state administration and TUN justice systems.

Keywords: *Electronic Administrative Decisions, Object of Lawsuit, Evidence, State Administration*

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan di Indonesia, kehadiran peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN) menjadi sebuah perwujudan Negara Hukum (*Rechtstaat*).¹ Dengan hadirnya peradilan TUN ini merupakan cerminan dari tujuan dibentuknya Peradilan TUN yang termuat dalam konsideran "menimbang" huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya yaitu sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat yang mana sudah digantikan dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009.²

Seiring berkembangnya zaman yang semakin terbuka dengan teknologi hal tersebut mempengaruhi sistematika dalam KTUN yang dimana melahirkan sistem baru, sebagai contohnya adalah Mahkamah Agung mengeluarkan

¹ Aju Putrijanti, "Jurisprudence of State Administrative Courts in The Development of State Administrative Law", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Statistic* 21, No. 2 (2021): 161-174, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.161-174>.

² Aju Putrijanti, "The Competence of the Administrative Court and Administrative Justice", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 14, No. 2 (2020): 97-112, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no2.1890>.

beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya perwujudan Peradilan Elektronik di Indonesia.³ Peraturan perundang-undangan yang dimaksud tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma Nomor 3 Tahun 2018). Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur mengenai pengadiministrasian suatu perkara yang dilakukan secara elektronik. Kemudian, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Selanjutnya disebut Perma Nomor 1 Tahun 2019). Peraturan Mahkamah Agung ini menjelaskan mengenai pengadministrasian perkara secara elektronik dan acara di pengadilan secara elektronik.⁴

Kedua peraturan mahkamah agung diatas hanyalah sebagai pendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern yang mengikuti perkembangan zaman sekarang, karena terbukti dengan jelas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 maupun Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan tidak mengatur terkait objek elektronik KTUN.⁵

Selaku lembaga negara yang bergerak di pengadilan pun sudah memanfaatkan teknologi dengan baik. Penerapan teknologi yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah menghasilkan beberapa sistem elektronik: Pertama, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang

³ Dedi Putra, "A Modern Judicial System in Indonesia: Legal Breakthrough of E-Court dnd E-Legal Proceeding", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, No. 2 (2022): 275-297, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.275-297>.

⁴ Sahira Jati Pratiwi, Steven, Adinda Destaloka Putri Permatasari, "The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems", *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, No. 1 (2020): 39-56, <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.

⁵ Siti Fatwah & Kusnadi Umar, "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 1, No. 3 (2020): 582-593, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/19536>.

digunakan untuk penanganan perkara. Artinya adalah sebuah portal pelayanan yang memberikan informasi perkara bagi warga masyarakat pencari keadilan yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Sistem ini memuat Daftar Arsip Perkara yang dapat digunakan oleh semua Pengadilan yang ada di Indonesia.

Kedua, Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang digunakan untuk administrasi kepegawaian; merupakan terobosan reformasi birokrasi di bidang pelayanan kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dirancang sebagai solusi untuk instansi pemerintah dalam menangani manajemen kepegawaian sehingga hal tersebut dapat memudahkan proses birokrasi dalam rangka peningkatan maupun untuk perbaikan pelayanan administrasi kepegawaian. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2017 yang mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan SIMPEG adalah rangkaian informasi dan data pegawai yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang berfungsi menjalankan proses bisnis dan menghasilkan informasi yang berguna.

Ketiga, Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) merupakan *platform* Mahkamah Agung berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk menerima pelaporan atau pengaduan baik dari masyarakat maupun dari internal Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, panitera, jurusita, dan pegawai pengadilan.

Keempat, Layanan Publik Terpadu (*excellent court services*) yang digunakan pada tingkat pertama dan tingkat banding. Sehingga hal ini membuktikan bahwa peradilan di Indonesia sudah siap untuk memperoleh sebuah objek yang berbentuk elektronik, karena dengan keempat sistem diatas menjadi dasar

apabila jika ingin melakukan seluruh proses secara daring (*online*) atau elektronik.⁶

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau dan mengevaluasi apakah regulasi yang berlaku saat ini cukup memadai untuk mengatur keputusan TUN yang diterbitkan secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak hukum dari keputusan TUN elektronik serta bagaimana mekanisme peradilan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas adapun yang menjadi pokok permasalahan mengenai kedudukan KTUN elektronik sebagai objek gugatan TUN dan Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam proses validasi KTUN elektronik dalam persidangan tata usaha negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari: c Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁶ Michael Gerry & Rina Elsa Rizkiana, “The Optimization Strategy of E-Courts Organizing Quality in Indonesia” *UNTAG Law Review* 7, No. 1 (2023): 11-20, <http://dx.doi.org/10.56444/ulrev.v7i1.3874>

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan KTUN Elektronik sebagai Objek Gugatan TUN

Di era digitalisasi ini, hampir seluruh lini kehidupan dibantu menggunakan teknologi dalam mempermudah pekerjaan. Begitu juga dengan pemerintah yang juga ikut bergeser dengan menggunakan teknologi dalam pelayanan publik untuk mempercepat administrasi.⁷ Salah satu bentuk dari digitalisasi ini ialah munculnya KTUN yang berbentuk elektronik (KTUN-E). KTUN sendiri menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁸

Dalam satu peristiwa hukum bisa terdapat beberapa ranah hukum didalamnya tergantung pada perspektif atau sudut pandang dan tergantung pada aturan hukum yang meliputinya serta apa yang dipersoalkan oleh para pihak. Maka timbulah pertanyaan apa yang dimaksud dengan sengketa dan sengketa tata usaha negara.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Perselisihan ini dapat muncul di berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam hubungan pribadi atau kelompok.

⁷ Nataliia Hliborob, "Digitization Of Public Services: Legal Regulation in the Context of European Principles", *Administrative law and process* 1, No. 32 (2021): 28-40, <https://doi.org/10.17721/2227-796X.2021.1.03>.

⁸ Heni Rosida, et.al., "The Effectiveness of The Implementation of The e-Court Justice System and The Impact on Administrative Court in Indonesia", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 2 (2022): 258-272, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.58270>.

Sengketa kerap kali menimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat, dan sering kali memerlukan penyelesaian yang adil agar masalah dapat diselesaikan dengan baik.

Sedangkan sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*).⁹ Menurut F.H van der Burg sebagaimana dikutip oleh Safitri & Sa'adah penyelesaian sengketa-sengketa tata usaha negara dapat ditempuh melalui dua kemungkinan, pertama melalui peradilan tata usaha Negara/peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*) dan kedua melalui banding administrasi (*administratief beroep*).¹⁰

Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No 9 tahun 2004 menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Seiring berjalannya waktu penggunaan teknologi digital memungkinkan pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian informasi secara efisien dan cepat. Salah satunya ialah KTUN elektronik yang dalam hal ini digunakan sebagai objek sengketa.¹¹

Dalam perkembangannya didalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga dikenal dengan keputusan yang bersifat elektronis yaitu keputusan yang dibuat atau

⁹ Erna Dwi Safitri & Nabitatus Sa'adah, "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 1, (2021):34-45, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Rasji, Valencia Prasetyo Ningrum, Yuliya Safitri, "Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, No. 8 (2022): 1357-1367, <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.475>.

disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik. Dalam hal ini Pejabat dan/atau Badan Pemerintahlah yang dapat membuat keputusan berbentuk elektronik. Jika mengacu kepada Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa apa saja yang tidak termasuk dalam pengertian dari KTUN, meliputi:

- a. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. KTUN yang masih memerlukan persetujuan;
- d. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. KTUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, tidak semua KTUN dapat diujikan sebagaimana dalam Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU Peratun, KTUN yang tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun meliputi: Pertama, KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Kedua, KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, yaitu pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang. Ketiga, KTUN yang masih memerlukan persetujuan, yaitu keputusan yang untuk dapat berlaku

masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan, seringkali pengaturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya KTUN diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Namun, untuk keputusan yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.

Keempat, KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka Jaksa menurut Pasal 14 huruf d KUHP ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan kepadanya. Adapun KTUN berdasarkan ketentuan KUHAP misalnya ketika penuntut umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka. Sedangkan KTUN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana misalnya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi.

Kelima, KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya Dirjen Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang

didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan para pihak; keputusan yang didasarkan pada amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri kehakiman, setelah menerima usul ketua pengadilan negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Pasal 54 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Keenam, KTUN mengenai tata usaha TNI, merupakan kompetensi absolut Peradilan Militer. Ketujuh, keputusan KPU baik pusat maupun daerah mengenai hasil pemilu, merupakan kewenangan MK. Selain itu, apabila merujuk pada Pasal 49 UU Peratun, disebutkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN apabila KTUN yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, KTUN dalam bentuk elektronik tetap dapat digugat ke PTUN apabila tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti transparansi dan akuntabilitas. Gugatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) hari sejak diketahui sengketa berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI tetapi Transparansi yang dimaksud ialah pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh publik mengenai kebijakan, keputusan, dan proses administrasi.¹² Transparansi membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya ialah akuntabilitas dimana setiap

¹² Guntur Aris Prabowo, "Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Secara Elektronik", *Jurist-Diction* 4, No. 4, (2021): 1399–1430. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28454>.

tindakan dan keputusan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Aparat pemerintahan harus siap memberikan penjelasan dan laporan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diambil dan hasilnya.

Namun demikian KTUN elektronik sebagai objek sengketa dalam gugatan administrasi negara harus memenuhi syarat-syarat sah sesuai ketentuan hukum administrasi negara agar teruji validitas hukumnya. Hal ini sejalan dengan prinsip Negara Hukum.¹³ KTUN menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif, antara lain: Pertama, merupakan penetapan tertulis, istilah penetapan tertulis yang dimaksud ialah bukan bentuknya yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat berwenang yang harus tertulis melainkan menunjukkan isinya yang harus memberi kemudahan dalam segi pembuktiannya. Syarat KTUN yang dimaksud dalam ketetapan tertulis menurut undang-undang tersebut mencakup Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, serta kepada siapa tulisan itu ditujukan dan perihal apa yang ditetapkan di dalamnya.

Kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Badan atau pejabat TUN disini merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan cara memperoleh atribusi, mandat atau delegasi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan badan atau pejabat yang berwenang melakukan suatu urusan pemerintahan maka dia dapat dikatakan sebagai badan atau pejabat TUN.

¹³ Fikri Hadi, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (Agustus 2023): 171. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

Ketiga, berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan hukum tata usaha negara bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain atau menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan.

Keempat, Berdasarkan peraturan perundang-undangan. KTUN dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik artinya peraturan tersebut terkait dengan hukum publik dan semua peraturan tersebut bersifat mengikat secara umum sehingga digunakan sebagai acuan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan bersifat hukum publik.

Kelima, bersifat Individual, Konkret dan Final. Bersifat konkret disini artinya objek yang menjadi KTUN itu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan dan tidak abstrak. Selanjutnya bersifat individual artinya keputusan yang dibuat bukan untuk khalayak umum namun kepada pihak yang secara khusus disebutkan didalamnya. Dan terakhir bersifat final ialah artinya menandakan KTUN telah mencapai titik akhir dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh badan atau pejabat yang mengeluarkannya.

Keenam, menimbulkan akibat hukum. Beberapa akibat hukum yang dapat ditimbulkan antara lain *Declaratoir* atau menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada, *Constitutief* atau menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru, Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada.

Kedudukan KTUN Elektronik tidak terdapat secara tertulis dalam UU Peratun, melainkan ada pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan Pasal 38 ayat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mengatur secara tegas bahwa, keputusan berbentuk elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.

2. Sistem Pembuktian KTUN Elektronik sebagai Objek Gugatan TUN

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 51 Tahun 2009.

Dalam pembuktian KTUN elektronik terkait validitasnya maka pengadilan tata usaha negara harus memastikan bahwa keputusan tersebut dikeluarkan atau disampaikan oleh sistem elektronik yang diakui dan ditetapkan oleh pejabat atau instansi berwenang.¹⁴ Selain sistem yang berwenang, pejabat yang mengeluarkan keputusan elektronik tersebut juga harus dipastikan memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika KTUN elektronik dikeluarkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan atau melampaui kewenangan itu maka keputusan tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Maka beberapa aspek yang akan di uji oleh hakim pada saat persidangan ialah :

¹⁴ Sudarsono, "Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Peratun* 1, No. 1 (2018): 57-78, <https://doi.org/10.25216/peratun.112018.%25p>

- a. Aspek kewenangan, berhubungan dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan dalam pembuatan KTUN sesuai dengan undang-undang. Jika dikaitkan dengan KTUN elektronik maka kewenangan tersebut harus bisa diverifikasi melalui sistem digital sehingga melalui mekanisme digital yang menerbitkan KTUN harus menjamin bahwa hanya pejabat tata usaha negara berwenang yang dapat menerbitkan KTUN tersebut.
- b. Aspek substansi/materi, berkaitan dengan isi dari keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat telah sesuai dengan aturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun dalam bentuk elektronik. Pemeriksaan dalam hal substansi mencakup keabsahan data elektronik, keotentikan dokumen, tidak mengalami perubahan serta memiliki tanda tangan elektronik yang menunjukkan keaslian Keputusan.
- c. Aspek prosedural, berkaitan dengan pemenuhan standar prosedur elektronik yang berlaku mengenai penerbitan KTUN elektronik.

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, keputusan yang dibuat oleh pemerintah baik berbentuk fisik ataupun elektronik tetap harus mematuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 76/G/2017/PTUN.JKT berkaitan dengan notifikasi produk yang dikeluarkan oleh BPOM yang dalam hal ini menjadi pihak tergugat. Dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan meskipun keputusan diterbitkan secara elektronik dan bersifat memberikan informasi, tetapi isi atau kontennya telah memenuhi unsur-unsur sebagai KTUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No 51 Tahun 2009 jo Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan sehingga keputusan tersebut dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di PTUN.

Jika kita telusuri lebih dalam lagi pada putusan tersebut pihak tergugat mendalilkan bahwa objek yang sedang menjadi sengketa tersebut bukanlah

KTUN melainkan hanya sebuah dokumen pemberitahuan. Dalam pertimbangan hukum, hakim berpendapat bahwa KTUN sudah pasti mengandung informasi atau pemberitahuan sedangkan sebaliknya dokumen pemberitahuan belum tentu merupakan KTUN. Perbedaannya ialah terdapat pada isi atau kontennya yaitu apakah dokumen yang berisi informasi atau pemberitahuan itu mengandung unsur-unsur KTUN atau tidak.¹⁵

Menurut penjelasan pasal 1 ayat 3 UU Peratun menjelaskan penetapan tertulis tersebut lebih mengarah kepada isi dan bukan bentuknya maka meskipun keputusan tersebut diterbitkan secara elektronik dan bersifat memberikan informasi tetapi isi atau kontennya telah memenuhi unsur-unsur sebagai KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Secara kewenangan pun objek sengketa tersebut diterbitkan oleh badan yang berwenang yaitu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dimana itu menjadi tanggung jawabnya untuk mengeluarkan keputusan tersebut melalui atribusi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/ PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika didalam Pasal 4 ayat (1). Dari segi substansi keputusan tersebut telah memenuhi hak, kewajiban, larangan, atau izin. Secara prosedur keputusan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena didalam kasus tersebut penggugat tidak memproduksi atau mengimpor dan mengedarkan kosmetik dalam jangka waktu 6 bulan sehingga pihak tergugat memberikan peringatan akan rencana pencabutan notifikasi milik penggugat.

Mengenai tanda tangan elektronik yang menunjukkan keaslian sebuah keputusan, pasal 11 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹⁵ Ilham Dwi Rafiqi, et.al., “Judicial Activism Sebagai Peluang Progresivitas Hakim dalam Peradilan Tata Usaha Negara” dalam *Dinamika Hukum: Dalam Rangka Mengabadikan 70 Tahun Perjuangan dan Pengabdian Guru, Sahabat, dan Bapak Kami*, Prof. Sudarsono, S.H., M.S, Malang: Inteligencia Media, h. 231-253.

Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik diakui sebagai bukti yang sah karena didalam tanda tangan tersebut terdiri atas informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi selama memenuhi beberapa syarat terkait data pembuatan tanda tangan elektronik yang hanya dimiliki oleh pemilik tanda tangan elektronik, data pembuatan tanda tangan elektronik hanya dikuasai oleh pemilik tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan, setiap perubahan yang terjadi setelah penandatanganan elektronik dapat diketahui, dan terdapat metode tertentu yang dapat dipakai untuk memastikan bahwa data yang terkait dengan tanda tangan elektronik tetap terjaga keutuhannya. Jika kita lihat dalam pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa jika keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis maka keputusan wajib dibuat dalam bentuk elektronik yang dimana pada ayat (3) dinyatakan keputusan berbentuk elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan tertulis.

Maka untuk menjawab apakah KTUN-E dapat di uji di pengadilan, tentunya dapat. Karena dalam pasal 5 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa agar informasi elektronik/dokumen elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dimana keotentikannya harus terjamin. Keotentikan tersebut mengacu kepada dokumen tersebut bersifat asli atau belum diubah, dimanipulasi atau diintervensi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Jika dalam pengujiannya ternyata KTUN-E ini tidak dapat diverifikasi keasliannya maka ketetapan tata usaha negara tersebut dianggap tidak sah.

Prosedur penyerahan alat bukti surat oleh para pihak dalam sidang secara elektronik pada dasarnya diatur dalam Pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa sidang pembuktian dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam konteks Peradilan TUN, ketentuan ini menekankan

bahwa prinsip, jenis, dan prosedur pembuktian harus tetap diikuti sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan TUN. Ketentuan Pasal 100 UU Peratun menyatakan bahwa alat bukti terdiri dari: dokumen atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan pihak-pihak, dan pengetahuan hakim. Ketentuan itu perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan, termasuk Pasal 38 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang keputusan dalam bentuk elektronik. Sangat krusial bahwa informasi atau dokumen elektronik digunakan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan sengketa di pengadilan.

3. Tantangan Pembuktian KTUN Elektronik sebagai Objek Gugatan TUN

Dalam menjalankan tugasnya, Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memiliki tanggung jawab dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara, seperti sengketa yang timbul di bidang hukum tata usaha negara antara rakyat biasa atau hukum (anggota masyarakat) dengan lembaga atau pimpinan TUN (pemerintah) di tingkat pusat dan daerah. Perkembangan teknologi informasi dapat membawa banyak perubahan disemua bidang baik sosial, budaya, ekonomi, hukum, termasuk pemerintahan bidang Administrasi Negara.¹⁶

Pola kehidupan interaksi sosial masyarakat ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikuasai masyarakat yang bersangkutan, pada perkembangan dengan periode elektronik saat ini, setiap orang atau kelompok masyarakat atau negara harus dapat memanfaatkan media elektronik agar peradabannya tidak ketinggalan zaman.¹⁷ KTUN-E Penggunaan teknologi

¹⁶ Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma & Muhammad Adiguna Bimasakti, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2022.

¹⁷ Pratama Herry Herlambang, Yos Johan Utama, Aju Putrijanti,, "Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem

berdampak nyata bagi kemakmuran dan kemajuan peradaban manusia, namun dampak negatifnya ialah sulit dibuktikan karena tidak efektif melawan hukum dan proses validasi KTUN-E sebagai objek dalam peradilan bisa menjadi sangat lemah karena mudah dipalsukan dan hal ini hanya dipahami oleh orang-orang tertentu saja.

Sebagaimana diketahui, KTUN-E yang dijadikan sebagai objek gugatan PTUN telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Aturan ini juga didukung oleh visi misi Mahkamah Agung yaitu, "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Hebat" dengan mendukung penerapan Informasi Elektronik modern berbasis IT yang terintegrasi. Perkembangan ini menghasilkan berbagai peluang baru namun juga memberikan tantangan dalam proses pembuktian dan validasi KTUN-E dalam persidangan tata usaha negara.

Dalam proses validasi KTUN-E dalam persidangan tata usaha negara terdapat beberapa tantangan yaitu:

- a. Perlunya aturan khusus yang mengatur mengenai penggunaan dan keabsahan KTUN-E. Dalam era digital, tata usaha negara elektronik (*e-government*) semakin diandalkan untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi negara. Namun, regulasi yang mengatur penggunaan serta keabsahan keputusan yang dibuat secara elektronik masih sangat terbatas. Tanpa aturan yang komprehensif, keabsahan dan legitimasi keputusan yang diambil melalui sistem elektronik bisa diperdebatkan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus yang mengatur bagaimana KTUN-E

diambil, disahkan, dan disimpan agar memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan manual.

- b. Resiko keamanan data elektronik karena rentan untuk diretas. Keputusan elektronik melibatkan data-data penting dan rahasia yang harus dilindungi dari upaya peretasan. Dengan adanya risiko keamanan yang tinggi dalam dunia siber, KTUN-E sangat rentan terhadap kebocoran data, manipulasi, dan serangan siber lainnya. Sistem elektronik pemerintah harus memiliki keamanan yang kuat dan mengikuti standar perlindungan data yang ketat agar keputusan-keputusan tersebut tidak mudah diakses atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
- c. Kemampuan aparat penegak hukum yang dinilai kurang dapat mempersulit penilaian terhadap KTUN-E di pengadilan. Kurangnya kemampuan ini bisa menghambat proses penegakan hukum serta penilaian terhadap keabsahan keputusan elektronik di pengadilan. Pelatihan khusus dan peningkatan kompetensi di bidang digital dan forensik elektronik bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan agar mereka lebih siap dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan bukti dan keputusan elektronik
- d. Minimnya tenaga ahli yang mampu melakukan verifikasi terhadap keabsahan bukti elektronik. Verifikasi bukti elektronik memerlukan keahlian khusus yang hanya dimiliki oleh tenaga ahli di bidang digital forensik dan keamanan siber. Minimnya jumlah tenaga ahli di bidang ini dapat menjadi hambatan dalam proses validasi dan autentikasi bukti elektronik dalam kasus-kasus tata usaha negara. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pelatihan dan rekrutmen tenaga ahli yang mampu melakukan verifikasi bukti elektronik agar bukti-bukti tersebut dapat dipercaya dan digunakan dalam proses hukum.

Indonesia merupakan negara yang menjadikan aspek hukum sebagai landasan keadilan dan kesejahteraan sebagai prioritas utama dalam mengayomi

permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu lembaga yang menjadi tempat untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat ialah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Penerbitan peraturan tertentu sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Adapun aspek yuridis, KTUN Elektronik yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam PTUN ini telah diatur dalam UU PTUN serta PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Usaha Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun alasan KTUN elektronik dapat diuji di PTUN adalah tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang tata cara pembuktian keaslian barang bukti elektronik. Hal ini kiranya memerlukan pembaharuan dari segi hukum acara tata usaha negara. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah akses penyelenggaraan peradilan yang sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain itu, untuk membuktikan keabsahan KTUN elektronik yang akan menjadi objek gugatan di PTUN diperlukan ahli forensik yang memiliki kapabilitas yang memadai dibandingkan dengan ahli dari luar (Polri dan Kominfo). Faktor kedua adalah faktor penegakan hukum, yaitu adanya tuntutan peningkatan kinerja pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pemerintahan, sangat diharapkan oleh masyarakat. Hal ini kemudian diharapkan dari faktor penegakan hukum. Namun KTUN Elektronik dapat diuji pada PTUN jika memenuhi syarat substansi KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN.

D. PENUTUP

Untuk menguji keabsahan dan penggunaan KTUN-E sebagai alat bukti, hakim dapat menilai melalui syarat kewenangan, substansi maupun prosedural. Namun sayangnya perkembangan teknologi ini masih belum didukung atau terlaksana dengan baik karena belum ada peraturan yang mengatur khusus mengenai keputusan tata usaha elektronik ini sebagai objek gugatan, risiko keamanan data karena rentan diretas karena keputusan tata usaha negrara

elektronik menyimpan data rahasia yang perlu dilindungi dari serangan siber, sehingga sistem pemerintah harus memiliki keamanan data yang kuat dan standar perlindungan ketat, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dan urangnya pemahaman aparat tentang bukti dan keputusan elektronik dapat menghambat penegakan hukum, sehingga pelatihan di bidang digital sangat diperlukan dan yang terakhir minimnya tenaga ahli di bidang digital forensik sehingga pemerintah perlu meningkatkan pelatihan dan rekrutmen tenaga ahli untuk memvalidasi bukti elektronik secara efektif dalam proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma & Muhammad Adiguna Bimasakti, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Ilham Dwi Rafiqi, Arsyi Manggali Arya Putra, Alfath Anggara, "Judicial Activism Sebagai Peluang Progresivitas Hakim dalam Peradilan Tata Usaha Negara" dalam *Dinamika Hukum: Dalam Rangka Mengabadikan 70 Tahun Perjuangan dan Pengabdian Guru, Sahabat, dan Bapak Kami*, Prof. Sudarsono, S.H., M.S, Malang: Inteligencia Media, 2021.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Fatwah, Siti., & Kusnadi Umar, "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 1, No. 3 (2020): 582-593, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/19536>.
- Gerry, Michael., & Rina Elsa Rizkiana. "The Optimalization Strategy of E-Courts Organizing Quality in Indonesia" *UNTAG Law Review* 7, No. 1 (2023): 11-20, <http://dx.doi.org/10.56444/ulrev.v7i1.3874>.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (April 2022). <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Herlambang, Pratama Herry., Yos Johan Utama, Aju Putrijanti,, "Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, No. 1 (2024): 61-81, <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v%vi%i.20474>.
- Hliborob, Nataliia. "Digitization of Public Services: Legal Regulation in the Context of European Principles", *Administrative law and process* 1, No. 32 (2021): 28-40, <https://doi.org/10.17721/2227-796X.2021.1.03>.

- Putra, Dedi. "A Modern Judicial System in Indonesia: Legal Breakthrough of E-Court and E-Legal Proceeding", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, No. 2 (2022): 275-297, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.275-297>.
- Putrijanti, Aju. "Jurisprudence of State Administrative Courts in The Development of State Administrative Law", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Statistic* 21, No. 2 (2021): 161-174, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.161-174>.
- _____, "The Competence of the Administrative Court and Administrative Justice", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 14, No. 2 (2020): 97-112, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no2.1890>.
- Prabowo, Guntur Aris., "Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Secara Elektronik", *Jurist-Diction* 4, No. 4, (2021): 1399-1430. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28454>.
- Pratiwi, Sahira Jati., Steven, Adinda Destaloka Putri Permatasari, "The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems", *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, No. 1 (2020): 39-56, <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.
- Rasji, Valencia Prasetyo Ningrum, Yuliyah Safitri, "Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, No. 8 (2022): 1357-1367, <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.475>.
- Rosida, Heni., Nadiyah Meyliana Putri, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari, Ahsana Nadiyya, Christ Sella, "The Effectiveness of The Implementation of the e-Court Justice System and The Impact on Administrative Court in Indonesia", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 2 (2022): 258-272, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.58270>.
- Safitri, Erna Dwi., & Nabitatus Sa'adah. "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 1, (2021): 34-45, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>.
- Sudarsono, "Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Peratun* 1, No. 1 (2018): 57-78, <https://doi.org/10.25216/peratun.112018.%25p>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.